PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp / Fax (0536) 3221716 Laman www.kalteng.go.id, Pos-el sekda@kalteng.go.id

RENCANA AKSI PELAPORAN KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. LEONARD S. AMPUNG, M.M., M.T.**
Jabatan : Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Berjanji akan membuat Laporan Capaian Kinerja per Triwulan (Laporan Triwulan) sesuai dengan Dokumen Rencana Aksi Pelaporan dan Pengukuran Kinerja ini sebagai pengendalian dan pemantauan progress kemajuan kinerja selama satu tahun. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami bersama.

Palangka Raya, 2 Januari 2026
Plt. SEKRETARIS DAERAH,

Ir. LEONARD S. AMPUNG, M.M., M.T.
NIP. 196603151992031010

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp / Fax (0536) 3221716 Laman www.kalteng.go.id, Pos-el sekda@kalteng.go.id

RENCANA AKSI SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

A. Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Rencana Aksi Proses		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Program		Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kegiatan		Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital berbasis elektronik	1.Indeks Pelayanan Publik	2,63 Indeks		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital yang berbasis elektronik	Persentase terfasilitasinya penataan kelembagaan, analisis jabatan dan peningkatan pelayanan publik	100%		Terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penyusunan dan penginputan dokumen reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja lingkup pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se kalimantan tengah	Terselenggaranya fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja	1 Tahun		Tersusunnya dokumen hasil fasilitasi peningkatan pelayanan publik	Jumlah dokumen hasil fasilitasi peningkatan pelayanan publik	2 Dokumen	
			TW 1	Laporan rapat internal persiapan PEKPPP			TW 1	20%			TW 1	1 Tahun			TW 1	0 Dokumen
			TW 2	Paparan sosialisasi pelaksanaan PEKPPP Mandiri			TW 2	50%			TW 2	1 Tahun			TW 2	1 Dokumen
			TW 3	Laporan evaluasi form F-01 dan F-03 untuk PEKPPP Mandiri			TW 3	80%			TW 3	1 Tahun			TW 3	1 Dokumen
			TW 4	Penilaian Hasil Evaluasi Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 2,63			TW 4	100 %			TW 4	1 Tahun			TW 4	2 Dokumen
		2.Nilai SAKIP	73,50 Nilai										Tersusunnya dokumen hasil pelaksanaan reformasi birokrasi	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja	1 Dokumen	
			TW 1	Rekapitulasi Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah TA 2026,											TW 1	0 Dokumen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Rencana Aksi Proses		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Program		Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kegiatan		Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	
				Rekapitulasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah TA 2025.												
			TW2	Rekapitulasi Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah TA 2025											TW2	0 Dokumen
			TW3	Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah TA 2025											TW3	0 Dokumen
			TW4	Penilaian Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah TA 2026 mencapai 73,50											TW4	1 Dokumen
2.	Tersedianya bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum litigasi dan non-litigasi bagi organisasi perangkat daerah	1.Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui meditasi dan/atau ajudikasi non litigasi	16 Kasus		Meningkatnya penanganan sengketa hukum pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Tersedianya pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum litigasi dan non litigasi dan layanan hukum bagi organisasi perangkat daerah provinsi	100%		Tersedianya pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum litigasi dan layanan hukum bagi organisasi perangkat daerah provinsi kalimantan	Tersedianya pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum litigasi dan layanan hukum bagi organisasi perangkat daerah provinsi	6 Perkara litigasi 37 dokumen		Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	10 kasus	
			TW1	Penyelesaian Kasus litigasi dan non litigasi telah ditangani 3 kasus			TW1	20			TW1	1			TW1	2
			TW2	Penyelesaian Kasus litigasi dan non litigasi telah ditangani 7 kasus			TW2	50			TW2	2			TW2	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Rencana Aksi Proses		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Program		Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kegiatan		Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	
			TW3	Penyelesaian Kasus litigasi dan non litigasi telah ditangani 12 kasus		kalimantan tengah dan meningkatnya kesadaran hukum dan HAM bagi perangkat daerah dan aparatur	TW3	80	tengah	kalimantan tengah	TW3	3			TW3	3
			TW4	Penyelesaian Kasus litigasi dan non litigasi telah ditangani 16 kasus			TW4	100			TW4	6			TW4	2
										Tersedianya pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum litigasi dan layanan hukum bagi organisasi perangkat daerah provinsi kalimantan tengah	4 kasus non litigasi 37 dokumen		Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	10 Kasus	
											TW1	1			TW1	2
											TW2	2			TW2	3
											TW3	3			TW3	3
											TW4	4			TW4	2
3.	Tercapainya perluasan jangkauan perlindungan ekonomi untuk kemandirian masyarakat	1. Efektifnya pelaksanaan pengendalian inflasi	70 %		Tercapainya perluasan jangkauan perlindungan ekonomi untuk kemandirian masyarakat	Persentase keterlaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan	100%		Terselenggarayа koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan perekonomian dan pembangunan	Terselenggaranya kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan	1 Tahun		Tersusunnya dokumen pelaksanaan pengendalian inflasi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengendalian inflasi	1 Dokumen	
			TW1	Laporan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan daerah di Bidang Perekonomian dan Pembangunan			TW1	20%			TW1	1 Tahun			TW1	0 Dokumen
			TW2	Laporan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan			TW2	50%			TW2	1 Tahun			TW2	0 Dokume

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Rencana Aksi Proses		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Program		Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kegiatan		Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	
				evaluasi kebijakan daerah di Bidang Perekonomian dan Pembangunan												n
			TW3	Laporan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan daerah di Bidang Perekonomian dan Pembangunan			TW3	80%			TW3	1 Tahun			TW3	0 Dokumen
			TW4	Efektifitas Laporan Dokumen Hasil koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan daerah di Bidang Perekonomian dan Pembangunan tercapai 70%			TW4	100 %			TW4	1 Tahun			TW4	1 Dokumen
		2.Meningkatnya kinerja BUMD dan BLUD	70 %										Tersusunnya dokumen kinerja BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen hasil kinerja BUMD dan BLUD	1 Dokumen	
			TW1	Laporan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi BUMD dan BLUD											TW1	0 Dokumen
			TW2	Laporan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi BUMD dan BLUD											TW2	0 Dokumen
			TW3	Laporan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi BUMD dan											TW3	0 Dokumen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Rencana Aksi Proses		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Program		Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kegiatan		Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	
				BLUD												
			TW4	Laporan evaluasi BUMD dan BLUD Provinsi Kalimantan Tengah											TW4	1 Dokumen
		3. Persentase kebijakan daerah di bidang perekonomian yang disiapkan	70 %										Tersusunnya dokumen kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan di bidang perekonomian dan pembangunan	1 Dokumen	
			TW1	Laporan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan											TW1	0 Dokumen
			TW2	Laporan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan											TW2	0 Dokumen
			TW3	Laporan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan											TW3	0 Dokumen
			TW4	Laporan dokumen hasil koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan											TW4	1 Dokumen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Rencana Aksi Proses		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Program		Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kegiatan		Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	
				daerah di bidang perekonomian												
		4. Return on Asset (ROA) BUMD	2,32 %										Tersusunnya dokumen Return on Asset (ROA) BUMD Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen Return on Asset (ROA) BUMD Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	
			TW 1	Laporan rekapitulasi Return on Asset (ROA) BUMD Provinsi Kalimantan Tengah											TW 1	0 Dokumen
			TW 2	Laporan rekapitulasi Return on Asset (ROA) BUMD Provinsi Kalimantan Tengah											TW 2	0 Dokumen
			TW 3	Laporan rekapitulasi Return on Asset (ROA) BUMD Provinsi Kalimantan Tengah											TW 3	0 Dokumen
			TW 4	Laporan Evaluasi Return on Asset (ROA) BUMD Provinsi Kalimantan Tengah											TW 4	1 Dokumen
4.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan	1. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	92 %		Persentase efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	92%		Persentase efektivitas fasilitas pembinaan mental spiritual	Jumlah sarana dan prasarana spiritual yang dikelola	200 unit		Terwujudnya efektivitas fasilitas pembinaan mental spiritual	Jumlah sarana dan prasarana spiritual yang dikelola	200 unit	
			TW 1	Penyusunan indikator kinerja dan target program			TW 1	20%			TW 1	50 unit			TW 1	50 Unit

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Rencana Aksi Proses		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Program		Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kegiatan		Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	
	rakyat		TW 2	Laporan Pelaksanaan program atau kegiatan kesejahteraan rakyat			TW 2	50%			TW 2	100 unit			TW 2	100 Unit
			TW 3	Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kesejahteraan rakyat			TW 3	80%			TW 3	150 unit			TW 3	150 Unit
			TW 4	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat tercapai 92%			TW 4	92%			TW 4	200 unit			TW 4	200 Unit
														Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan	1 Dokumen	
															TW 1	0 Dokumen
															TW 2	0 Dokumen
															TW 3	0 Dokumen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Rencana Aksi Proses		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Program		Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kegiatan		Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	
														Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	TW 4	1 Dokumen
														Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen	
															TW 1	0 Dokumen
															TW 2	0 Dokumen
															TW 3	0 Dokumen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Rencana Aksi Proses		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Program		Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kegiatan		Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	
															TW 4	1 Dokumen
														Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	2 Dokumen	
															TW 1	0 Dokumen
															TW 2	1 Dokumen
															TW 3	1 Dokumen
															TW 4	2 Dokumen
														Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	2 Dokumen	
															TW 1	0 Dokumen
															TW 2	1 Dokumen
															TW 3	1 Dokumen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Rencana Aksi Proses		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Program		Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kegiatan		Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	
															TW 4	2 Dokumen
5.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum dalam fungsi pemerintahan umum serta administrasi wilayah pemerintahan dan pertanahan	1.Jumlah kerjasama antar pemerintah yang difasilitasi	2 Dokumen		Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan pemerintahan otonomi daerah dan kerjasama	Efektivitas kerja sama daerah	80 %		Fasilitasi kerja sama antar pemerintah	Jumlah kerja sama antar pemerintah yang difasilitasi	1 Dokumen		Terlaksananya fasilitasi kerja sama antar pemerintah	Jumlah kerjasama antar pemerintah yang difasilitasi	2 Dokumen	
			TW 1	Kerjasama antar pemerintah yang telah difasilitasi tercapai 1 dokumen			TW 1	20%			TW 1	0 Dokumen			TW 1	0 Dokumen
			TW 2	Kerjasama antar pemerintah yang telah difasilitasi tercapai 1 dokumen			TW 2	40%			TW 2	0 Dokumen			TW 2	1 Dokumen
			TW 3	Kerjasama antar pemerintah yang telah difasilitasi tercapai 1 dokumen			TW 3	60%			TW 3	0 Dokumen			TW 3	1 Dokumen
			TW 4	Kerjasama antar pemerintah yang telah difasilitasi tercapai 2 dokumen			TW 4	80%			TW 4	1 Dokumen			TW 4	2 Dokumen
		2.Jumlah kerjasama badan usaha/swasta yang difasilitasi	2 Dokumen						Fasilitasi kerja sama badan usaha/swasta	Jumlah kerja sama badan usaha/swasta yang difasilitasi	1 Dokumen		Fasilitasi kerja sama badan usaha/swasta	Jumlah kerjasama badan usaha/swasta yang difasilitasi	2 Dokumen	
			TW 1	kerjasama badan usaha/swasta yang difasilitasi 1 dokumen							TW 1	0 Dokumen			TW 1	0 Dokumen
			TW 2	kerjasama badan usaha/swasta yang difasilitasi 1 dokumen							TW 2	0 Dokumen			TW 2	1 Dokumen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Rencana Aksi Proses		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Program		Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kegiatan		Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	
			TW 3	kerjasama badan usaha/swasta yang difasilitasi 1 dokumen							TW 3	0 Dokumen			TW 3	1 Dokumen
			TW 4	kerjasama badan usaha/swasta yang difasilitasi 1 dokumen							TW 4	1 Dokumen			TW 4	2 Dokumen
6.	Terlaksananya penyusunan produk hukum daerah yang implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan terwujudnya program pembentukan produk hukum pengaturan dan penetapan	1. Indeks Reformasi Hukum	72,50 Indeks		Mewujudkan produk hukum provinsi dan daerah kabupaten/kota yang implementatif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tersedianya pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum litigasi dan non litigasi, layanan hukum, dan meningkatnya kesadaran hukum dan HAM bagi	Persentase terwujudnya produk hukum provinsi dan daerah kabupaten/kota yang implementatif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tersedianya pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum litigasi dan non litigasi, layanan hukum,	100 %		Terwujudnya produk hukum daerah yang implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan kebutuhan hukum di daerah dan meningkatkan penataan pengelolaan serta penyebarluasan informasi hukum melalui penyediaan sarana dan prasarana hukum	Jumlah produk hukum pengaturan yang disusun	60 dokumen		Terfasilitasinya penyusunan produk hukum pengaturan	Jumlah produk hukum pengaturan yang disusun	60 dokumen	
			TW 1	Laporan Inventarisasi dan identifikasi peraturan daerah/perkada			TW 1	20%			TW 1	60 dokumen			TW 1	60 dokumen
											TW 2	60 dokumen			TW 2	60 dokumen
											TW 3	60 dokumen			TW 3	60 dokumen
											TW 4	60 dokumen			TW 4	60 dokumen
			TW 2	Laporan			T	50%		Jumlah produk	372 dokumen		Terlaksananya fasilitasi dan	Jumlah produk	372 dokumen	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Rencana Aksi Proses		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Program		Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kegiatan		Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	
				Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan daerah/perkada	perangkat daerah dan aparatur	dan meningkatnya kesadaran hukum dan HAM bagi perangkat daerah dan aparatur	W2			hukum kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi	TW1	372 dokumen	evaluasi produk hukum kabupaten/kota	hukum kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi	TW1	372 dokumen
			TW3	Laporan Penginputan data dukung pada sistem penilaian IRH			TW3	80%			TW2	372 dokumen			TW2	372 dokumen
			TW4	Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah TA 2026 mencapai 72,50			TW4	100 %			TW3	372 dokumen			TW3	372 dokumen
		2.Persentase terlaksananya produk hukum daerah yang implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta terwujudnya perlindunga	100%								TW4	372 dokumen			TW4	372 dokumen
			TW1	Persentase tersusunnya produk hukum yang sesuai kaidah perundang-undangan 20%						Jumlah produk hukum yang didokumentasi dan dikelola informasi hukumnya	201 dokumen		Terlaksananya pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya	Jumlah produk hukum yang didokumentasi dan dikelola informasi hukumnya	201 dokumen	
			TW2	Persentase tersusunnya produk hukum yang sesuai kaidah perundang-undangan 50%							TW1	201 dokumen			TW1	201 dokumen
											TW2	201 dokumen			TW2	201 dokumen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Rencana Aksi Proses		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Program		Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kegiatan		Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	
		n hukum kepada semua unsur pemerintah	TW 3	Persentase tersusunnya produk hukum yang sesuai kaidah perundang-undangan 80%							TW 3	201 dokumen			TW 3	201 dokumen
			TW 4	Persentase tersusunnya produk hukum yang sesuai kaidah perundang-undangan 100%							TW 4	201 dokumen			TW 4	201 dokumen
										Jumlah produk hukum penetapan yang disusun	300 dokumen		Terfasilitasinya penyusunan produk hukum pengaturan	Jumlah produk hukum penetapan yang disusun	300 dokumen	
											TW 1	300 dokumen			TW 1	300 dokumen
											TW 2	300 dokumen			TW 2	300 dokumen
											TW 3	300 dokumen			TW 3	300 dokumen
											TW 4	300 dokumen			TW 4	300 dokumen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Keuangan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran		Target Realisasi Penyerapan Anggaran				Ket
				RAPBD	Pagu Murni	TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	**Program Penataan Organisasi**			**2.191.800.000**	**110.000.000**	**22.000.000**	**55.000.000**	**88.000.000**	**110.000.000**	
	1)	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		850.000.000	40.000.000	8.000.000	20.000.000	32.000.000	40.000.000	
		a)	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	300.000.000	20.000.000	4.000.000	10.000.000	16.000.000	20.000.000	
		b)	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	10.000.000	2.000.000	5.000.000	8.000.000	10.000.000	10.000.000	
	2)	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		1.341.800.000	70.000.000	14.000.000	35.000.000	56.000.000	70.000.000	Biro Organisasi
		a)	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	300.000.000	20.000.000	4.000.000	10.000.000	16.000.000	20.000.000	
		b)	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	250.000.000	10.000.000	2.000.000	5.000.000	8.000.000	10.000.000	
		c)	Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	291.800.000	10.000.000	2.000.000	5.000.000	8.000.000	10.000.000	
		d)	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	250.000.000	10.000.000	2.000.000	5.000.000	8.000.000	10.000.000	
		e)	Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	250.000.000	20.000.000	4.000.000	10.000.000	16.000.000	20.000.000	
2.	**Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**			**2.904.438.700**	**737.372.000**	**133.200.000**	**384.810.400**	**575.943.750**	**737.372.000**	
	1)	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan		1.480.000.000	439.172.000	60.400.000	158.210.400	293.310.400	439.172.000	
		a)	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	350.000.000	77.900.000	15.580.000	38.950.000	62.320.000	77.900.000	
		b)	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	150.000.000	59.200.000	11.840.000	29.600.000	47.360.000	59.200.000	
		c)	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	240.000.000	105.550.000	21.110.000	52.775.000	84.440.000	105.550.000	Biro Hukum
		d)	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	740.000.000	196.522.000	39.304.400	98.261.000	157.217.600	196.522.000	
	2)	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum		1.424.438.700	298.200.000	72.800.000	226.600.000	282.633.350	298.200.000	
		a)	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	1.154.438.700	252.000.000	50.400.000	126.000.000	201.600.000	252.000.000	
		b)	Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	270.000.000	46.200.000	9.240.000	23.100.000	36.960.000	46.200.000	
3.	**Program Perekonomian dan Pembangunan**			**2.465.000.000**	**295.725.496**	**59.145.099**	**147.862.748**	**236.580.397**	**295.725.496**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran		Target Realisasi Penyerapan Anggaran				Ket
				RAPBD	Pagu Murni	TW I	TW II	TW III	TW IV	
	1)	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		975.000.000	214.725.496	42.945.099	107.362.748	171.780.397	214.725.496	
		a)	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	750.000.000	141.125.496	28.225.099	70.562.748	112.900.397	141.125.496	
		b)	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	225.000.000	73.600.000	14.720.000	36.800.000	58.880.000	73.600.000	
	2)	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		625.000.000	33.000.000	6.600.000	16.500.000	26.400.000	33.000.000	
		a)	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	225.000.000	11.000.000	2.200.000	5.500.000	8.800.000	11.000.000	Biro Perekonomian
		b)	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	175.000.000	11.000.000	2.200.000	5.500.000	8.800.000	11.000.000	
		c)	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	225.000.000	11.000.000	2.200.000	5.500.000	8.800.000	11.000.000	
	3)	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		865.000.000	48.000.000	9.600.000	24.000.000	38.400.000	48.000.000	
		a)	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	320.000.000	12.000.000	2.400.000	6.000.000	9.600.000	12.000.000	
		b)	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	225.000.000	12.000.000	2.400.000	6.000.000	9.600.000	12.000.000	
		c)	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	320.000.000	24.000.000	4.800.000	12.000.000	19.200.000	24.000.000	
4.	**Program Kesejahteraan Rakyat**			**105.373.698.192**	**147.608.644.026,27**	**29.521.728.805**	**73.804.322.013**	**118.086.915.221**	**147.608.644.026,27**	
	1)	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		**79.425.921.398**	**91.661.322.979,27**	**18.332.264.596**	**45.830.661.490**	**73.329.058.383**	**91.661.322.979,27**	
		a)	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	**79.097.499.580**	**91.520.572.779,27**	**18.304.114.556**	**45.760.286.390**	**73.216.458.223**	**91.520.572.779,27**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran		Target Realisasi Penyerapan Anggaran				Ket
				RAPBD	Pagu Murni	TW I	TW II	TW III	TW IV	
		b)	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	**328.421.818**	**140.750.200**	**28.150.040**	**70.375.100**	**112.600.160**	**140.750.200**	
	2)	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		**25.266.210.241,50**	**55.365.125.320**	**11.073.025.064**	**27.682.562.660**	**44.292.100.256**	**55.365.125.320**	
		a)	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	**24.815.739.392,50**	**50.110.887.660**	**10.022.177.532**	**25.055.443.830**	**40.088.710.128**	**50.110.887.660**	
		b)	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	**326.701.574**	**110.537.660**	**22.107.532**	**55.268.830**	**88.430.128**	**110.537.660**	Biro Kesejahteraan Rakyat
		c)	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	**123.769.275**	**5.143.700.000**	**1.028.740.000**	**2.571.850.000**	**4.114.960.000**	**5.143.700.000**	
	3)	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		**681.566.552,50**	**582.195.727**	**116.439.145**	**291.097.864**	**465.756.582**	**582.195.727**	
		a)	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	**225.034.158,50**	**190.026.147**	**38.005.229**	**95.013.074**	**152.020.918**	**190.026.147**	
		b)	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	**329.593.496**	**271.489.340**	**54.297.868**	**135.744.670**	**217.191.472**	**271.489.340**	
		c)	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informasi, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	**126.938.898**	**120.680.240**	**24.136.048**	**60.340.120**	**96.544.192**	**120.680.240**	
5.	**Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah**			**3.331.000.000**	**997.755.052**	**199.551.010**	**498.877.526**	**798.204.042**	**997.755.052**	Biro

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran		Target Realisasi Penyerapan Anggaran				Ket
				RAPBD	Pagu Murni	TW I	TW II	TW III	TW IV	
	1)	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah		500.000.000	184.107.631	36.821.526	92.053.816	147.286.105	184.107.631	Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		a)	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	200.000.000	66.003.231	13.200.646	33.001.616	52.802.585	66.003.231	
		b)	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	150.000.000	66.961.400	13.392.280	33.480.700	53.569.120	66.961.400	
		c)	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	150.000.000	51.143.000	10.228.600	25.571.500	40.914.400	51.143.000	
6.	**Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa**			**2.628.045.000**	**396.765.952**	**79.353.190**	**198.382.976**	**317.412.762**	**396.765.952**	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	1)	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		**938.376.301**	194.561.952	38.912.390	97.280.976	155.649.562	194.561.952	
		a)	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	**354.000.000**	115.000.000	23.000.000	57.500.000	92.000.000	115.000.000	
		b)	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	**384.376.301**	61.661.952	12.332.390	30.830.976	49.329.562	61.661.952	
		c)	Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	**200.000.000**	17.900.000	3.580.000	8.950.000	14.320.000	17.900.000	
7.	**Program Kebijakan Administrasi Pembangunan**			**1.364.909.000**	**213.956.000**	**42.791.200**	**106.978.000**	**171.164.800**	**213.956.000**	Biro Administrasi Pembangunan
	1)	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		**789.909.000**	112.756.000	22.551.200	56.378.000	90.204.800	112.756.000	
		a)	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	**452.419.000**	76.650.000	15.330.000	38.325.000	61.320.000	76.650.000	
		b)	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	**83.915.000**	6.039.000	1.207.800	3.019.500	4.831.200	6.039.000	
		c)	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	**253.575.000**	30.067.000	6.013.400	15.033.500	24.053.600	30.067.000	
	2)	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		**575.000.000**	101.200.000	20.240.000	50.600.000	80.960.000	101.200.000	
		a)	Sub Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	**150.000.000**	17.100.000	3.420.000	8.550.000	13.680.000	17.100.000	
		b)	Sub Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	**150.000.000**	67.000.000	13.400.000	33.500.000	53.600.000	67.000.000	
		c)	Sub Kegiatan Fasilitasi Perumusan	**275.000.000**	17.100.000	3.420.000	8.550.000	13.680.000	17.100.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran		Target Realisasi Penyerapan Anggaran				Ket
				RAPBD	Pagu Murni	TW I	TW II	TW III	TW IV	
			Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah							
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			**196.344.693.925,54**	**110.743.673.196,79**	**22.148.734.639**	**55.371.836.598**	**88.594.938.557**	**110.743.673.196,79**	
	1)	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		820.206.350,54	168.837.897,44	33.767.579	84.418.949	135.070.318	168.837.897,44	
		a)	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.408.600	10.000.000	2.000.000	5.000.000	8.000.000	10.000.000	Biro Umum
		b)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.586.250	107.987.897,44	21.597.579	53.993.949	86.390.318	107.987.897,44	
		c)	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.920.000	10.500.000	2.100.000	5.250.000	8.400.000	10.500.000	
9.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			**6.631.585.803**	**3.774.422.780,75**	**754.884.556**	**1.887.211.390**	**3.019.538.225**	**3.774.422.780,75**	
	1)	Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan		1.836.212.764	483.007.628,75	96.601.526	241.503.814	386.406.103	483.007.628,75	
		a)	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	783.497.105	433.676.457,20	86.735.291	216.838.229	346.941.166	433.676.457,20	Biro Administrasi Pimpinan
		b)	Sub Kegiatan Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	323.279.651	3.163.163,55	632.633	1.581.582	2.530.531	3.163.163,55	
		c)	Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	729.436.008	46.168.008	9.233.602	23.084.004	36.934.406	46.168.008	

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

Ir. LEONARD S. AMPUNG, M.M., M.T.

NIP. 196603151992031010

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).